Koperasi Merah Putih Diminta Tidak Tabrak BUMDes

SRAGEN (KR) - Program Koperasi Merah Putih yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan bisa sinergi dan tidak tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apalagi selama ini BUMDes telah berjalan dan menghasilkan keuntungan bagi pendapatan desa.

Salah satu yang memungkinkan koperasi merah putih dapat berjalan yakni menjalankan usaha di sektor strategis. Kepala Desa (Kades) Kaliwedi, Kecamatan Gondang Sragen, Daryono kepada wartawan Jumat (25/4) mengatakan, pihaknya selama ini telah berhasil mengelola BUMDes. Sehingga menyumbangkan pendapatan desa dan memaksimalkan potensi desa.

Terkait rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa, Daryono mengaku siap selama bidang usahanya mengelola kebutuhan masyarakat. Dia menyampaikan BUMDes selama ini sudah mengelola pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Dari hasil BUMDes masuk kas desa dan digunakan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Untuk program Koperasi Merah Putih, pihaknya mendukung sepenuhnya. Program BUMDes yang sudah berjalan diharapkan bisa bersinergi dengan koperasi merah putih. "Koperasi itu kan dari simpanan pokok dan wajib masyarakat, dikelola menjadi sebuah usaha," ujarnya.

Lantas melihat kondisi desa, usaha yang tepat dari koperasi merah putih yakni usaha pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. "Menurut analisa saya, kalau pupuk subsidi dan Gas LPG 3 kg masuk dalam koperasi merah putih. Itu bisa berjalan dengan baik. Baru setelah itu kebutuhan pertanian, sembako setelah usaha koperasi sudah stabil," jelas Daryono.

Namun jenis usaha dari BUMDes dan Koperasi Merah Putih diharapkan tidak saling bertabrakan. Lantas dengan mengelola usaha yang banyak dibutuhkan masyarakat, koperasi akan stabil. "Jadi Bumdes mengelola potensi desa, kalau koperasi mengelola kebutuhan pokok masyarakat saja," tandasnya.

Desa Kaliwedi sendiri, lanjutnya, sudah menggelar musdes dalam rangka pembentukan koperasi merah putih. Terkait tindak lanjut, sudah dibahas dengan masyarakat. "Antusias masyarakat luar biasa, asalkan gas elpiji dan pupuk subsidi dikelola koperasi merah putih," terangnya. (Sam)-f

TERBAGI TIGA KLOTER

673 Calhaj Siap Diberangkatkan

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 673 calon jamaah haji (Calhaj) Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok terbang (kloter) siap diberangkatkan. Persiapan masih terus dilakukan sebelum jadwal keberangkatan dilaksanakan. Persiapan tersebut antara lain kegiatan manasik haji dan pemeriksaan kesehatan.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sukoharjo Abdul Rochman, Jumat (25/4) mengatakan, Kemenag Sukoharjo mencatat ada 673 calhaj Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 siap diberangkatkan. Rinciannya sebanyak 668 calhaj reguler dan 5 orang petugas haji daerah (PHD). Baik calhaj reguler dan PHD semuanya sudah mendapat informasi dan diminta melakukan persiapan.

Sebanyak lima orang PHD yang akan ikut diberangkatkan bertugas memberikan pelayanan selama ibadah haji berlangsung. Bentuk pelayanan tersebut meliputi pelayanan dari sisi ibadah, kesehatan dan pelayanan umum lainnya.

Kemenag Sukoharjo saat ini masih melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan pihak terkait di daerah dan pusat. "Masih persiapan sebelum dilaksanakan pemberangkatan haji. Kegiatan tersebut seperti manasik haji dan pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Seluruh calhaj saat ini sudah diminta Kemenag Sukoharjo untuk terus menjaga kondisi kesehatannya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh besar pada pelaksanaan ibadah haji.

Kemenag Sukoharjo masih menunggu jadwal keberangkatan calhaj. Nantinya waktu pelaksanan setelah diketahui akan langsung dilakukan persiapan dan sosialisasi ke calhaj. "Jadwal keberangkatan haji belum ada kepastian dan kami masih menunggu. Tapi terkait pembagian kelompok terbang (kloter) sudah ada," lanjutnya.

Sebanyak 673 calhaj Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 nanti akan terbagi menjadi tiga kloter yakni kloter 72, kloter 73 dan kloter 74. Sebelumnya sempat dibahas pula opsi pembagian kloter 71, kloter 72 dan kloter 74. Dalam skema tersebut kloter 71 calhaj Kabupaten Sukoharjo akan tergabung dengan Calhaj Kabupaten Wonogiri. Kloter 72 diisi penuh calhaj Kabupaten Sukoharjo dan kloter 73 tergabung dengan Calhaj Kabupaten Klaten. (Mam)-f

WALIKOTA SALATIGA BERI SINYAL

Kaji Beban Anggaran TPP

SALATIGA (KR)- Walikota Salatiga Robby Hernawan memberi sinyal bahwa pihaknya bakal mempelajari dan mengkaji mengenai beban anggaran yang berada di alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Langkah ini dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran terutama selama dua tahun ke depan, Sebab, tahun 2027 alokasi belanja pegawai harus di angka 30 persen dari APBD Kota Salatiga.

"Kita memang melakukan efisiensi anggaran, dan kami bisa saja melakukan evaluasi dan mempelajari serta mengkaji soal TPP bagi ASN dan pegawai. Beban belanja pegawai di Salatiga ini cukup besar yang kini sudah mencapai 44 persen termasuk adanya TPP," tandas Walkota Salatiga, Robby Hernawan kepada wartawan Selasa (22/4) lalu.

Ia juga mencontohkan banyak beban pegawai honorer dan THL yang cukup banyak di Salatiga sehingga beban anggaran belanja pegawai juga besar. Salah satunya, Robby menyebutkan di RSUD Salatiga. ‚ÄúDi RSUD banyak honorer‚,Äù katanya.

Dikatakan, tahun 2027 anggaran Salatiga harus mencapai dan turun 30 persen dan harus dilakukan dalam waktu 2 tahun lagi. Ia juga menegaskan pihaknya akan memberikan solusi khusus untuk efisiensi tenaga.

Ia mengaku tidak bisa serta merta langsung melakukan pemangkasan, karena THL punya anak istri dan perut yang harus dipikir. "Kita carikan solusi, yang bisa menampung tenaga kerja di perusahaan industri apalagi Salatiga akan ada investor masuk‚,Äù kata Robby.

Robby membenarkan akan melakukan terobosan untuk menyalurkan tenaga kerja ke ke industri sebagai salah satu solusi efisiensi tenaga di Pemkot Salatiga. "Nanti akan kami salurkan ke industri. Soal mereka tidak mau yang bukan urusan kami. Saya ini orang tua bapaknya warga. Harus mencarikan solusi. Istilahnya jangan pemangkasan,," katanya. **(Sus)-f**

UPAYAKAN KONSERVASI

Gunung Slamet Diusulkan Jadi Taman Nasional

BATANG (KR)- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Gunung Slamet sudah diajukan menjadi taman nasional ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu sebagai upaya untuk melakukan konservasi lingkungan di kawasan tersebut.

KR-Budiono

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin Musrenbangwil di Eks Karesidenan Pekalongan.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Pekalongan di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (24/4). Surat permohonan dari Pemprov Jawa Tengah sudah dikirim ke Kementerian. Gubernur berharap segera ada jawaban dari kementerian lingkungan hidup.

Menurut Gubernur, usulan tersebut sejalan dengan nafas pembangunan daerah Jawa Tengah untuk tahun 2026, yaitu meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Untuk memujudkan hal itu, masalah lingkungan, khususnya ketersediaan air di daerah-daerah harus menjadi prioritas. Selain memperbaiki infrastruktur pendukung pertanian, kawasan tangkapan air juga harus menjadi perhatian.

Luthfi menyatakan, aturan terkait serapan air tanah di Jawa Tengah sudah ada Perda yang diterbitkan pada 2021. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa evaluasi air tanah dilakukan satu tahun sekali. "Kalau perlu, sebulan sekali kita evaluasi agar serapan air tanah tidak habis di konsumsi," ujarnya.

Selain konservasi lingkungan di kawasan pegunungan, Luthfi juga akan melanjutkan program "Mageri Laut" yang dulu sempat ia gagas saat menjadi Kapolda Jateng. Selain itu, Penanaman mangrove di sepanjang pesisir juga akan digalakkan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat, baik saat penanaman maupun perawatan mangrove pasca tanam agar tidak mati.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan, kajian sudah dilakukan terkait pengusulan taman nasional tersebut. Kawasan Taman Nasional Gunung Slamet meliputi beberapa daerah seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Banyumas. Dengan dijadikan sebagai taman nasional, maka konservasi di gunung bisa terjaga.

Sebelumnya seorang pegiat atau pecinta alam di Kabupaten Batang, Suwong, sempat menyampaikan usulan kepada Ahmad Luthfi saat acara Musrenbangwil. Menurut Suwong, untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, maka ketahanan air sangat penting. Jika kebutuhan air tidak tercukupi, target untuk menjadi lumbung pangan bisa tidak tercapai. **(Bdi)-f**

MENSOS TINJAU SEKOLAH RAKYAT DI BANYUMAS

Orangtua Jadi Kunci Sukses Program Pendidikan

BANYUMAS (KR) - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, Kamis (25/4) melakukan kunjungan kerja ke Sentra Satria Baturraden, Kabupaten Banyumas. Lokasi tersebut dipersiapkan sebagai salah satu titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Gus Ipul mengajak para calon siswa dan orangtua untuk meninjau langsung sarana dan prasarana pendidikan yang disiapkan, mulai dari ruang kelas hingga asrama. "Hari ini kami bersama Bupati Banyumas bertemu dengan para orangtua calon siswa. Mereka adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu yang telah diidentifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.

KR-Istimewa

Mensos RI Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Satria Baturraden bertemu calon siswa dan orang tua.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya sistematis Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah, guna memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

"Alhamdulillah, anak-anak terlihat sangat semangat. Para orangtua juga menunjukkan komitmen untuk mendukung penuh proses belajar anak-anak mereka di Sekolah Rakyat," tutur Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat yang disiapkan di Sentra Baturraden akan memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025/2026, khusus untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dua rombongan belajar akan menampung sebanyak 50 siswa. Ke depan, sekolah ini direncanakan menerima peserta didik untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA.

"Mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan, tapi juga diawasi dan dikawal pelaksanaannya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyambut baik kehadiran Sekolah Rakyat di wilayahnya. Ia mendorong para orangtua untuk terus mendukung pendidikan anak-anak hingga jenjang tertinggi. "Kami ingin anak-anak yang orangtuanya kurang mampu bisa tetap sekolah, bahkan sampai SMA. Mari kita dorong mereka untuk bisa sekolah lebih tinggi dari orangtuanya," pesannya.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi peningkatan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di wilayah Banyumas dan sekitarnya. **(Dri)-f**

SK PENGANGKATAN CPNS DISERAHKAN

Bupati Magelang Ingatkan Tanggung Jawab

MAGELANG (KR) - Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyerahkan SK Pengangkatan CPNS Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 di Pendopo Soepadi komplek Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang, Kamis (24/4). Dalam kesempatan ini Bupati Magelang juga menyampaikan beberapa pesan, sekaligus mengingatkan banyak hal.

Dikatakan Grengseng, tentang adanya pertanggungjawaban yang sama dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebagai manusia, kata dia, harus memberikan yang terbaik bagi lingkungan. Atau memberikan kebaikan bagi lingkungan.

Disinggung juga mengenai adanya dunia kecil (bawono alit), bawono tengah dan bawono ageng. Bawono alit, lanjutnya, merupakan lingkungan keluarga. "Kedatangan kita harus dapat memberikan rasa bahagia, suasana yang baik bagi keluarga kita," katanya.

Bawono tengah merupakan tetangga dan saudara atau keluarga besar. "Keberadaan kita bisa memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita," tambahnya.

Bawono ageng, lanjutnya, dunia besar dan itu adalah di tempat pengabdian. Meskipun para CPNS ini berasal dari banyak daerah, diantaranya Yogyakarta, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang maupun lainnya, tetapi Pemerintahan Kabupaten Magelang adalah ladang pengabdian bagi mereka yang baru saja menerima SK Pengangkatan, dan nantinya akan dinilai di "yaumul qiyamah".

Para CPNS, kata dia, sekarang menjadi bagian dari penggerak roda pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat. Profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap tugas yang dijalankan. Pemerintah Kabupaten Magelang menaruh harapan besar agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung pembangunan daerah.

KR-Thoha

Bupati Magelang saat menyerahkan SK kepada perwakilan penerima.

Momentum penyerahan SK ini juga menjadi awal untuk beradaptasi, belajar, dan mengembangkan kompetensi diri. "Saya mengajak para CPNS untuk senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika pemerintahan. Jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas diri, karena keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kualitas SDM yang mengelolanya," tuturnya. **(Tha)-f**

BABAK BARU PENGEJARAN ASET BANK PURWOREJO

Tim Likuidasi Tempuh Jalur Hukum

PURWOREJO (KR) - Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo telah menunjuk kuasa hukum untuk mengejar aset-aset bank yang secara resmi sudah dilikuidasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 20 Februari 2024 lalu. Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo menjadi babak baru pengejaran aset bank dari nasabah yang dinilai melakukan wanprestasi.

Sidang Gugatan Sederhana (GS) dengan tergugat Agung Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Kamis (24/4). Sidang kedua dengan Nomor Perkara: 15/Pdt.G.S/2025/PN Pwr ini dimulai pukul 12.31 WIB dan dipimpin Hakim Ketua Hernawan, S.H., M.H.

Pihak penggugat dalam hal ini Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo melalui kuasa hukumnya hadir, pihak tergugat juga hadir sesuai arahan majelis hakim pada sidang pertama sebelumnya yang digelar Kamis (17/4/2025) lalu. "Penggugat sudah men upayakan gugatannya, silahkan saudara tergugat bisa mempejarinya sebelum masuk agenda persidangan berikutnya dengan agenda jawaban tergugat. Harapannya, permasalahan bisa diselesaikan dengan damai tanpa mediasi," ucap Hakim Ketua Hernawan dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu.

KR-Hendri Utomo

Kuasa hukum tim likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo menunjukkan berkas gugatan sebelum sidang GS di PN Purworejo.

Dalam persidangan, tergugat mengaku sudah bertemu dengan lembaga penjamin simpanan (LPS) termasuk dengan penggugat, ia menyatakan bahwa komunikasi selama ini berjalan baik. "Pada prinsipnya, saya sebagai mitra Bank Purworejo punya niatan baik, membayar kredit sesuai dengan perjanjian, namun setelah bank dilikuidasi dan harus melakukan pelunasan kami bingung," ucapnya.

Menurutnya, jika kemudian harus dilakukan mekanisme penyerahan jaminan seperti mobil misalnya,akan diserahkan. Dalam siding kali ini ia juga membantah mangkir dalam sidang sebelumnya, ia mengaku belum menerima surat undangan sidang dari PN Purworejo.

Selama persidangan, tergugat menebalkan pernyataan bahwa dirinya tidak datang dalam sidang pertama dengan alasan pindah rumah, sehingga panggilan dari PN melalui kantor pos tidak sampai ke tangannya. "Sekali lagi saya tidak ada niatan untuk mangkir," ujarnya. **(*-5)-f**